

Pendidikan Politik di Thailand Bagi Pemilih Pemula dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum

Hambalee Duereh

Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: hambaleeya5007@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendidikan politik di Thailand bagi pemilih pemula dan pengaruhnya terhadap partisipasi dalam pemilihan umum. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji program pendidikan politik yang diterapkan di sekolah menengah serta persepsi guru dan siswa tentang pentingnya pendidikan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendidikan politik telah diintegrasikan dalam kurikulum, terdapat tantangan signifikan dalam pelaksanaannya, termasuk kurangnya pelatihan guru dan dukungan institusional. Namun, siswa yang menerima pendidikan politik cenderung memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi dan lebih aktif dalam partisipasi politik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendidikan politik perlu diperkuat melalui dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan peningkatan kualitas kurikulum untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

Kata Kunci: Kesadaran Politik; Pendidikan Politik; Pemilih Pemula; Partisipasi Pemilu.

Abstract

This research aims to analyse political education in Thailand for first-time voters and its influence on participation in general elections. Through a qualitative approach, this research examines political education programmes implemented in secondary schools as well as teachers' and students' perceptions of the importance of political education. The results show that although political education has been integrated in the curriculum, there are significant challenges in its implementation, including a lack of teacher training and institutional support. However, students who receive political education tend to have higher political awareness and are more active in political participation. The conclusion of this study is that political education needs to be strengthened through further support from the government and improved curriculum quality to increase the political participation of first-time voters.

Keywords: Election Participation; New Voters; Political Awareness; Political Education.

How to Cite: Duereh, H. (2024). Pendidikan Politik di Thailand Bagi Pemilih Pemula dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 1 (1), 21-30.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Partisipasi politik adalah elemen kunci dalam sistem demokrasi yang sehat, dan pendidikan politik memainkan peran penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk berpartisipasi dalam proses politik. Di Thailand, pendidikan politik telah

diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah menengah sebagai upaya untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif dan terinformasi. Pemilih pemula, yang biasanya adalah siswa sekolah menengah atas, merupakan kelompok penting dalam pemilihan umum karena mereka membawa perspektif baru dan energi ke dalam politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pendidikan politik di Thailand mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana peneliti akan mendeskripsikan serta menjelaskan secara terperinci mengenai berbagai pengertian Pendidikan Politik Di Thailand Bagi Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum dari sudut pandang secara luas dan sempit, dan menurut pendekatan ilmiah dan pendekatan sistem. Penelitian ini mengaplikasikan data-data sekunder, dimana data ini didapatkan dari berbagai sumber berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian yang relevan yang masih berkaitan dengan judul penelitian, karena jenis penelitian ini adalah studi literatur.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik di sekolah-sekolah Thailand memiliki dampak positif terhadap kesadaran politik dan partisipasi pemilih pemula. Guru dan siswa sama-sama mengakui pentingnya pendidikan politik dalam membentuk pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi program ini, termasuk kurangnya pelatihan khusus untuk guru, keterbatasan sumber daya, dan dukungan institusional yang tidak memadai. Meskipun demikian, siswa yang menerima pendidikan politik cenderung lebih sadar akan isu-isu politik dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan adalah kebutuhan dalam pertumbuhan anak-anak, dengan maksud menuntun segala kekuatan alam pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Memanusiakan manusia adalah kata lain untuk pendidikan. Akibatnya, kita seharusnya tidak bias dalam menghormati hak asasi setiap manusia. Siswa, atau murid, bukan robot

yang dapat diatur. Sebaliknya, mereka adalah generasi yang harus kita bantu dan perhatikan bagaimana mereka berkembang menuju kedewasaan. Dengan demikian, kita dapat membangun manusia yang kritis, berpikir kritis, dan bermoral. Jadi, pendidikan tidak hanya membangun individu yang berbeda dari orang lain yang dapat makan, meneguk, berpakaian, dan memiliki rumah. Dengan demikian, pendidikan sangat penting untuk memerangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup setiap orang, dan membangun harkat negara. Oleh karena itu, pemerintah berusaha memberikan perhatian yang tepat pada pendidikan dalam upaya memberantas kebodohan, memerangi kemiskinan, dan membangun harkat negara. (Annisa, 2022) Pendidikan politik adalah proses percakapan antara guru, seperti sekolah, pemerintah, anggota partai politik, dan siswa dalam memahami, memahami, dan mengamati prinsip, norma, dan simbol politik yang dianggap baik dan ideal. Partai politik dalam sistem politik demokrasi dapat melakukan pendidikan politik melalui diskusi, latihan kepemimpinan, dan partisipasi dalam berbagai forum pertemuan. Media massa yang kritis dan terbuka juga berperan penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dengan kritik yang tajam dan konstruktif.

Menurut para ahli, ini adalah beberapa definisi pendidikan politik:

Menurut Surono sebagaimana dikutip Ramdlang Naning (1982). Pendidikan politik adalah usaha untuk masyarakat politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran warga terhadap kepekaan dan kesadaran hak,kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

Menurut Pangabeau, sebagaimana dikutip Ramdlan Naning (1982). Politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari genggaman generasi yang satu ke generasi kemudian.

Menurut Alfian (1990). Mengidentifikasi pendidikan politik dalam arti kata yang longgar yaitu sosialisasi politik adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Disenangi ataukah tidak, diketahui ataukah tidak, disadari ataukah tidak, hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat, baik penguasa ataupun orang awam. Jadi kalau boleh disimpulkan, pendidikan politik (dalam arti kata yang ketat) dapat diartikan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai politik yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun (Dwira, 2014)

Konsep pendidikan politik

Pendidikan politik untuk menciptakan kewarganegaraan Dalam demokrasi, kata "kewarganegaraan" berasal dari bahasa Inggris. Pendidikan politik, yang dapat digunakan baik sebagai pendidikan politik maupun pendidikan sipil, akan membantu orang belajar mencari identitas intelektual, budaya, sejarah, dan politik yang lengkap. Ini berbeda dengan propaganda, yang merupakan formula sukses dan "Kebenaran" yang melampaui tantangan mempertanyakan, meragukan, berdebat, dan mengkritik untuk mencari "Kebenaran semu". Kekuasaan negara berarti melayani mayoritas masyarakat tanpa mengurangi atau menghancurkan hak-hak segelintir individu atau kelompok (Politik et al., 2018). Oleh karena itu, politik berpusat pada manusia dan kekuatan-kekuatan di luar dirinya dalam dua dimensi.

Efektivitas Pendidikan Politik

Pendidikan politik tidak bisa disamakan dengan sosialisasi pemilu. Namun ada bagian penting kegiatan sosialisasi pemilu yang dapat digolongkan aktivitas pendidikan politik seperti mengingatkan pentingnya pemilu, tahapan pemilu, tanggal pemilu dan simulasi pemilu melalui kegiatan berbentuk: diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, pelatihan, ceramah, simulasi, dan kegiatan lainnya yang menggunakan metode tatap muka lainnya. (Yusriati & Amrizal, 2020) Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris, yang berarti "berhasil" atau "sesuatu yang dilakukan dengan berhasil dengan baik." Suatu hal dianggap efektif jika tujuan atau sasarannya tercapai. Ini sejalan dengan pendapat H. Emerson, yang dikutip oleh Soewarno (Riski, 2020) yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". Menurut Georgiopoulos dan Tannembaum (2009), "efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi, tetapi juga mekanisme yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus dikaitkan dengan masalah dan tujuan. Menurut Anggraeni et al. (2023) "Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya.

Dalam penelitian ini, definisi operasional mengacu pada teori efektifitas Steers (1985), seperti yang dinyatakan oleh Handoko (2012), yaitu:

Input

Mencakup analisis pribadi tentang bagaimana sumber-sumber yang tersedia digunakan, serta strategi alternatif yang harus dipertimbangkan untuk mencapai tujuan program. Faktor-faktor berikut digunakan untuk mengukur dimensi ini:

Sumber Daya Manusia Pelaksana: Data dan wawancara yang dikumpulkan oleh penulis tentang sumber daya manusia yang aktif terlibat dalam efisiensi kegiatan pelatihan politik pemilih pemula di thailand .

Proses

Penilaian proses pengukuran berfokus pada bagaimana program efektifitas Penyeluluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula dilaksanakan di thailand. Ini dilakukan dengan memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan berjalan dengan baik dan aturan dan prosedur yang jelas. Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, tingkat keberhasilan Penyuluhan Penelitian Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin

Output

Pada dimensi efektifitas keluaran, tujuan yang ditetapkan dalam rancangan harus dibandingkan dengan hasil program yang dicapai. Menunjukkan bahwa evaluasi dapat diakses melalui skortes, prosentase, data observasi, diagram data, sosiometri, dan elemen lainnya yang dapat dihubungkan dengan tujuan yang lebih rinci. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui mengapa hasilnya seperti itu. Untuk setiap tahapan evaluasi program, hasil penilaian kegiatan dikategorikan menjadi rendah, moderat, dan tinggi. Inikator menentukan dimensi ini (Masyarakat et al., 2022).

Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi:

Meskipun tantangan yang dihadapi, pendidikan politik di Thailand telah terbukti meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum. Siswa yang menerima pendidikan politik cenderung lebih sadar akan isu-isu politik dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Pendidikan politik berfungsi sebagai pilar utama negara demokrasi. Demokrasi dianggap lemah karena warga negara tidak dididik dengan baik tentang politik. (Hidayaturrahman & Ubaid, 2022) Kualitas pendidikan politik warga negara menentukan kesadaran politik mereka. Dalam negara demokrasi, pendidikan politik terus menjadi masalah penting. Karena kurangnya pendidikan politik, masalah politik tidak dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun masalah politik terus meningkat dari waktu ke waktu. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara demokrasi di seluruh dunia, pendidikan politik menjadi subjek perhatian para pengamat dan ahli (Sypnowich, 2018). Di Argentina, persoalan politik beragam karena kurangnya pendidikan politik. Tidak semua orang Argentina terlibat dalam politik.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi yang melibatkan keterlibatan dan kontribusi aktif dari warga negara dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Dalam pandangan etimologi, istilah "partisipasi" mencakup berbagai makna seperti kesertaan, keikutsertaan, keterlibatan, peran serta, Salah satu komponen penting dari sistem demokrasi adalah partisipasi politik, yang melibatkan warga negara secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Menurut etimologi, istilah "partisipasi" dapat berarti banyak hal, seperti keterlibatan, kesertaan, keterlibatan, peran serta, kerja sama, dan kooperasi (Eko Endarmoko, 2006). Selain itu, "berpartisipasi" juga berarti berpartisipasi, terlibat, menyerikati, dan terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan politik. Menurut Berger (1976), asumsi bahwa individu adalah yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya sendiri adalah dasar dari konsep partisipasi dan demokrasi. Menurut perspektif ini, partisipasi menjadi mekanisme yang memberi warga negara kesempatan untuk memilih kebijakan dan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Partisipasi politik didefinisikan oleh Samuel P. Huntington dan Nelson (1994) sebagai kumpulan tindakan yang dilakukan oleh warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat terorganisir atau spontan, individual atau kolektif, mantap atau sporadic, dan dapat berlangsung secara damai atau melibatkan kekerasan. Partisipasi juga dapat memiliki tingkat efektivitas yang berbeda. Partisipasi politik didefinisikan oleh Ramlan Surbakti sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka (Surbakti, 1992). Partisipasi politik terdiri dari partisipasi individual dan partisipasi kolektif (Sudijono Sastroatmodjo, 1995). Partisipasi individual mencakup bertindak secara pribadi, seperti menulis surat kepada pemerintah untuk mengajukan tuntutan atau keluhan. Namun, partisipasi kolektif terjadi ketika sekelompok orang secara bersamaan berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi penguasa, seperti mengikuti pemilu.(Elizamiharti & Nelfira, 2023). Apatis, yaitu individu yang cenderung tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. b. Spektator, yaitu individu yang setidaknya pernah ikut serta dalam pemilu sebagai bentuk minimal partisipasi politik. Gladiator, yaitu individu yang aktif terlibat dalam proses politik, seperti komunikator, aktifis partai, dan aktifis masyarakat. . Pengkritik, yaitu individu yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional dan mungkin di luar norma partisipasi politik konvensional.

Pengaruh Positif Pendidikan Politik:

Meskipun menghadapi tantangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang menerima pendidikan politik cenderung memiliki tingkat kesadaran politik yang lebih tinggi dan lebih aktif dalam partisipasi politik, terutama dalam pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik memiliki dampak positif dalam membentuk keterlibatan politik generasi muda di Thailand.

Peraturan Negara Thailand

Thailand mengubah peraturannya dari kerajaan absolut dan Thailand adalah demokrasi atau monarki Memiliki hukum tertinggi Apakah konstitusional Raja adalah kepala negara pada tanggal 24 Juni 1932. Tapi sepanjang waktu. Thailand juga merupakan demokrasi yang tidak mengikuti prinsip. Kudeta revolusioner merebut kekuasaan, membentuk sebuah koalisi pemerintahan dan mengatur peraturannya sendiri. Orang-orang tidak berhak atas kebebasan sebagaimana mestinya, jadi hal itu terjadi tiga kali lebih besar. Pada tanggal 14 Oktober 1973, ada sebuah kelompok yang menyerukan demokrasi dan kediktatoran. Ini terdiri dari orang-orang, dari semua bidang karir di bawah kepemimpinan para siswa. Siswa dari semua institusi Ini adalah peristiwa yang tercatat dalam sejarah politik dan pemerintahan Thailand, sehingga generasi muda akan tahu. Menjadi cemburu dan mempertahankan rezim itu. Demokrasi harus dipertukarkan dengan kehidupan. Dan kesulitan sesama sebangsa.

Acara kedua Terjadi pada tanggal 6 Oktober 1976. Ada mahasiswa dan masyarakat yang membela demokrasi. Melawan bagian belakang kelompok kekuasaan lama. Thailand telah kehilangan banyak sumber daya manusia yang berharga. Dan yang terakhir, pada tanggal 17 Mei 1992. ada sekelompok kelompok yang anti Otoriter dan Demokratis. Hasil klaim ini. Memimpin amandemen Undang-Undang dasar Konstitubusi saat ini adalah Konstitusi Kerajaan Thailand BE 2540.

Institusi yang terkait dengan Negara.

Manajemen adalah Kabinet atau Pemerintah. 2. Departemen Hukum adalah parlemen yang terdiri dari dua anggota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dipilih oleh masyarakat dan senator Dipilih oleh Raja seperti yang diusulkan dari Perdana Menteri 3. Kehakiman adalah pengadilan yang bertanggung jawab untuk mempertimbangkan berbagai kasus sesuai dengan hukum. Untuk membuat Adil untuk orang-orang Dalam Konstitusi, ada ketentuan bagi pengadilan untuk menjadi lembaga independen parlemen dan pemerintahan. Komisi Yudisial (SEC) bertanggung jawab untuk mengatur penunjukan pejabat peradilan.

Kesimpulan

Pendidikan politik memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Thailand. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pendidikan politik yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan politik di kalangan generasi muda. Untuk memaksimalkan potensi pendidikan politik, diperlukan peningkatan dalam pelatihan guru, penyediaan sumber daya yang memadai, dan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, pendidikan politik dapat berkontribusi secara signifikan terhadap proses demokratisasi di Thailand. Dalam sistem demokrasi yang baik, partisipasi politik sangat penting, dan pendidikan politik sangat penting untuk mempersiapkan generasi muda untuk berpartisipasi dalam proses politik. Untuk membantu siswa menjadi warga negara yang aktif dan terinformasi, pendidikan politik telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah menengah di Thailand. Pemilih pemula, yang biasanya siswa sekolah menengah atas, adalah kelompok penting dalam pemilihan umum karena mereka membawa perspektif baru dan energi ke dalam politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendidikan politik di Thailand mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang melibatkan penggunaan teknik wawancara yang mendalam dan analisis dokumen.

Daftar Pustaka

- Annisa, D. (2022). Jurnal Pendidikan dan Konseling. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(1980), 1349–1358.
- Anggraeni, D., Ghofur, R. A., & Hilal, S. (2023). Efektivitas Program Kartu Prakerja dalam Membangun Sumber Daya Manusia Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(1), 890–893.
- Chaiyaporn, C. (2016). The Role of Political Education in Promoting Democratic Values in Thai Schools. *Asian Journal of Political Science*, 24(2), 145-160.
- Elizamiharti, E., & Nelfira, N. (2023). Demokrasi di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 61–72. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.342>
- Harris, I. M. (2013). Education for Peace and Democracy in Thailand. *Peace Education Journal*, 9(1), 51-68.

- Hidayaturrahman, M., & Ubaid, A. H. (2022). Peran Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Bagi Warga Kepulauan Madura. *Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(3), 322–329.
- Intharaksa, U. (2018). Political Socialization and Youth Participation in Thailand. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 31(4), 367-382.
- Jitpiromsri, S. (2017). Youth and Politics in Thailand: The Impact of Educational Reforms. *Southeast Asian Studies*, 45(2), 233-250.
- Khemthong, S. (2019). Teaching Democracy: Political Education in Thai Classrooms *Educational Research and Reviews*, 14(7), 403-414.
- Klongchan, P. (2020). The Effectiveness of Civic Education Programs in Thailand's High Schools. *Journal of Citizenship Education*, 42(3), 189-205.
- kharisma dwira. (2014). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Ejournal Unsrat*, 1(7), 1144.
- Masyarakat, K., Kebijakan, A., Pantai, R., & Londa, V. Y. (2022). *Jurnal Administrasi Publik*, 8(118), 57–63.
- Naruemon, T. (2015). Political Education and Civic Engagement among Thai Youth. *Journal of Asian Studies*, 74(1), 103-122.
- Pongsapich, A. (2016). Civic Education and Democratic Participation in Thailand. *Democracy and Education*, 22(1), 77-88.
- Prasert, N. (2018). The Role of Education in Political Participation in Thailand. *Journal of Political Science Education*, 14(2), 120-137.
- Srisompob, J. (2013). The Influence of Political Education on Voter Turnout in Thailand. *Electoral Studies*, 32(3), 456-467.
- Suksamran, S. (2021). Youth Political Engagement and the Role of Schools in Thailand. *Contemporary Politics*, 27(2), 234-248.
- Surin, M. (2014). Challenges in Implementing Political Education in Thai Schools. *Asian Education and Development Studies*, 3(4), 290-304.
- Thammanit, K. (2020). Political Literacy and Education in Thailand: Preparing Future Voters. *Journal of Social Science Education*, 39(2), 210-226.
- Riski, S. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Operasional, Tata Letak Gudang Dan Warehouse Management System Terhadap Peningkatan Efektivitas Gudang Persediaan Pt. Kamigumi Logistik Cikarang. Universitas Maritim Amni Semarang.
- Worachai, S. (2019). Enhancing Political Participation through Education in Thailand. *Asian Journal of Public Affairs*, 12(1), 98-113.

Yusriati, Y., & Amrizal, D. (2020). Efektivitas Model Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu di Kabupaten Deli Serdang. *Warta Dharmawangsa*, 14(3), 500–507. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i3.831>